# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Komunikasi Politik sebagai kegiatan politik merupakan penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain. Kegiatan ini bersifat empirik, karena dilakukan secara nyata dalam kehidupan sosial dan komunikasi politik dilakukan saat kegiatan politik dalam sistem politik.

Komunikasi politk yang dibangun oleh salah satu kandidat calon dalam merancang strategi untuk mendapat dukungan dan kepercayaan dari para kader PAC dan DPC, guna menduduki posisi ketua merupakan suatu proses bangunan komunikasi politik yang dilakukan secara terus-menerus oleh salah satu calon kandidat untuk mencapai dan mendapat dukungan serta memenuhi target politiknya.

Bangunan komunikasi yang dilakukan dengan terus menjaga hubungan baik, keterbukaan informasi dan membangun kepercayaan antar kader merupakan hal yang sangat penting bagi calon ketua untuk mendapatkan suatu dukungan dari para kader-kader partai. Karena seorang organisatoris harus pandai dalam menjaga hubungan baik dengan berkomunikasi kepada para kader.

Pemilihan calon ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat melibatkan seluruh elemen partai PDI Perjuangan dari tingkatan Dewan Pimpinan Cabang (PAC), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan sampai tingkatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Semua elemen ikut andil dan

mempunyai peranan masing-masing tentu yang diatur di anggaran dasar/anggaran rumah tangga yang disingkat dengan AD/ART dan surat keputusan (SK) dari Partai PDI Perjuangan.

Pergantian ketua siliberganti dalam sebuah Partai Politik merupakan sebuah tradisi lima tahunan yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pergantian tersebut merupakan keharusan yang terus dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan guna untuk mejalankan AD/ART dan amanat organisasi dalam menjaga regenerasi dan kestabilan suatu partai politik.

Momentum pemilihan calon ketua ditingkatan DPD adalah pemilihan yang dilakukan ditingkatan Provinsi yang dilakukan oleh kader-kader partai untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan partai ditingkatan provinsi untuk melakukan regenerasi dan menggantikan kepengurusan yang lama dengan kepengurusan yang baru.

Musyawarah mufakat dalam ajang suatu pemilihan baik ditingkatan Pengurus Anak Cabang (PAC), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) merupakan suatu prinsip yang pertama kali dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tahun 2015 dalam melakukan pemilihan calon ketua dan kewajiban organisasi, musyawarah mufakat merupakan suatu yang baru dalam kubu partai PDI Perjuangan untuk mengindikasikan partai ini kearah moderenitas tetapi tidak menghilangkan nilai-nilai atau prinsip dari Pancasila itu sendiri. Peneliti mengajak untuk menilik kebelakang dimana dalam pemilihan calon ketua dari tingkatan

PAC, DPC hingga DPD, PDI Perjuangan menggunakan system *one man one vote* dari tahun 2000, 2005 dan 2010.

Kecendrungan para kandidat calon ketua yang rata-rata berumur 50 tahun keatas untuk mencalonkan ketua DPD PDI Perjuangan khususnya Jawa Barat, ketika ada salah satu kandidat calon yang berumur dibawah 40 tahun merupakan suatu hal yang tidak lumrah. Karena kalau melihat fakta terdahulu dalam pemilihan calon ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat dari periode tahun 2000, 2005, 2010 dan sampai ke tahun 2015 ada satu kandidat yang lebih muda ketika pemilihan calon ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat periode 2015-2020.

**Table Kandidat Calon Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat**

**Tabel 1.1**

**Komparasi Calon Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat periode 2000, 2005, 2010 s/d 2015**

| **Periode Pencalonan Calon Ketua DPD PDIP Jawa Barat** | **Nama Calon Ketua DPD PDIP Jawa Barat** | **Umur Kandidat Calon Ketua DPD PDIP Jawa Barat** |
|---|---|---|
| Pemiihan Calon Ketua DPD PDIP Jabar Periode 2000-2005 | **1.Rudi Harsa Tanaya**<br>**2.Endang Karman**<br>**3.Muchtar Budiana** | 50<br>60<br>60 |
| Pemiihan Calon Ketua DPD PDIP Jabar Periode 2005-2010 | **1.Rudi Harsa Tanaya**<br>*(Catatan: Menang Aklamasi)* | 55 |
| Pemiihan Calon Ketua DPD PDIP Jabar Periode 2010-2015 | **1.Rudi Harsa Tanaya**<br>**2.Eka Prasetya**<br>**3.Yadi Srimulyadi** | 60<br>50<br>50 |
| Pemiihan Calon Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar Periode 2015-2020 | **1.TB Hasanudin**<br>**2.Abdy Yuhana**<br>**3.Aang Hamid Suganda** | 60<br>38<br>70 |

*(Sumber: Arsip DPD PDI Perjuangan Jawa Barat 2015)*

DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat merupakan organisasi partai politik PDI Perjuangan yang berada di Provinsi Jawa Barat memiliki kewenangan tugas, pokok dan fungsi untuk mengurus partai di daerah Jawa Barat, seperti

Dewan Pengurus Cabang (DPC) sampai tingkat ranting sesuai dengan pedoman Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang berlaku.

PDI Perjuangan merupakan partai politik yang sebenarnya adalah partai yang secara langsung memiliki tali kesejarahan dengan partai politik masa orde lama. PDI Perjuangan sebenarnya kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia yang berdiri pada tanggal 10 Januari 1973. Partai Demokrasi Indonesia itu lahir dari hasil fusi 5 (lima) partai politik PNI, PARKINDO, Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan Partai Murba.

Reformasi telah membawa perubahan terhadap aspek-aspek kehidupan di Indonesia, baik dari segi sistem politik, ekonomi, hukum, budaya dan aspek lainnya telah mengalami pergeseran struktur sejak reformasi bergulir. Perubahan sistem yang multidimensi seperti ini telah menjadikan perubahan peta kekuatan politik baik di pusat maupun di daerah, yang menuntut adanya suatu pembaharuan dalam sistem politik agar lebih terbuka dan demokratis sesuai dengan harapan terciptanya suatu kestabilan politik yang dinamis.

Dampak reformasi terhadap bidang politik adalah tumbuh kembangnya suatu sistem politik itu sendiri terhadap tuntutan perubahan, seperti bentuk negara, sistem pemerintahan maupun sistem kepartaian. Salah satu implikasi dari reformasi tersebut adalah perubahan sistem kepartaian. Partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara.

Politik sebagai suatu peristiwa, kegiatan, atau proses yang melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam suatu negara dalam membuat kebijakan, keputusan, atau mendistribusikan nilai (berupa barang dan jasa) untuk mewujudkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

Komunikasi politik mempunyai arti yang sangat penting, terutama di era reformasi sekarang ini. Iklim keterbukaan dan demokratisasi yang dibangun, desentralisasi dan otonomi daerah, serta pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, maupun pemilihan kepala daerah yang juga nantinya dilakukan secara langsung akan semakin menambah pentingnya arti komunikasi politik di Indonesia.

Komunikasi politik sebagai suatu teori memang memiliki universalitas atau keberlakuan secara umum. Akan tetapi sebagai suatu praktik, komunikasi tentu memiiki perbedaan-perbedaan sebagai akibat adanya perbedaan adat istiadat dan budaya organisasi. Komunikasi politik itu sendiri di pengaruhi oleh sistem budaya dan sistem politik itu sendiri. Apabila di masa sebelum reformasi, komunikasi politik yang berkembang di Indonesia lebih bersifat satu arah yakni dari atas ke bawah *(updown),* maka di dalam era reformasi ini komunikasi yang berkembang di Indonesia lebih bersifat dua arah, yakni tidak hanya dari atas ke bawah tapi juga dari bawah ke atas *(bottom up).* Perubahan ini sejalan dengan perubahan sistem politik dan sistem sosial yang diterapkan di Indonesia, dari sistem politik yang otoriter dan tersentralisasi menjadi sistem politik dan sistem sosial yang demokratis dan terdesentralisasi.

Sang aktor atau komunikator politik dapat mengerti bahwa isi, tujuan dan keinginan pesan politik yang disampaikan adalah untuk mempengaruhi dan menggalang kepercayaan untuk suatu kedudukan tertentu. Komunikasi politik ini sangat penting karena mengandung pesan yang nantinya akan mempengaruhi orang lain supaya bersedia untuk mendukungnya. Di dunia politik tidak bisa terlepas dari persaingan, terutama di dalam era yang dipenuhi persaingan seperti sekarang dan dalam dunia politik, persaingan dapat terjadi dalam banyak hal.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan pokok masalah yang akan diteliti sebagai berikut yang terbagi ke dalam rumusan masalah makro (umum) serta rumusan masalah mikro (khusus).

### 1.2.1 Rumusan Masalah Makro

Adapun rumusan masalah makro terkait masalah yang akan diteliti oleh penelliti yaitu:

Bagaimana Dinamika Komunikasi Politik Konferda DPD PDI Perjuang Jawa Barat

### 1.2.2 Rumusan Masalah Mikro

Adapun rumusan masalah makro terkait masalah yang akan diteliti oleh penelliti yaitu:

1. Bagaimana **Proses Komunikasi Politik** Calon Ketua Termuda dalam Konferda DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Periode 2015-2020?
2. Bagaimana **Realitas Komunikasi Politik** Calon Ketua Termuda dalam Konferda DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Periode 2015-2020?

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan oleh peneliti mengenai dinamika komunikasi politik konferda DPD PDI Perjuangan Jawa Barat adalah sebagai berikut:

### 1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui serta menganalisa tentang dinamika komunikasi politik konferda DPD PDI Perjuangan Jawa Barat.

### 1.3.2 Tujuan Penelitian

Untuk membuat penelitian ini lebih terarah maka perlu dirumuskan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**1)** Untuk Mengetahui Proses Komunikasi Politik Calon Ketua Termuda dalam Konferda DPD PDI Perjuangan Jawa Barat.

**2)** Untuk Mengetahui Realitas Komunikasi Politik Calon Ketua Termuda dalam Konferda DPD PDI Perjuangan Jawa Barat.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis sebagai berikut:

### 1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk menambah disiplin ilmu dalam kajian Komunikasi Politik guna melengkapi karya-karya yang sudah ada.

### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

#### 1.4.2.1 Kegunaan Bagi Peneliti

Adapun kegunaan penelitian ini bagi peneliti adalah meningkatkan penegtahuan peneliti dalam mempelajari komunikasi politik dan disiplin ilmu komunikasi.

#### 1.4.2.2 Kegunaan Bagi Akademik

Adapun kegunaan penelitian ini secara akademik diharapkan dapat:

1. Dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengembangan dan menambah khazanah ilmu komunikasi, khususnya yang berkaitan dengan kajian komunikasi politik.

2. Memperkaya hasil-hasil penelitian komunikasi yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan tradisi studi kasus yang menggunakan perspektif komunikasi politik.
3. Sebagai bahan masukan yang berguna untuk penelitian selanjutnya dibidang yang sama atau yang ada hubungannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan pengembangan di bidang ilmu komunikasi atau komunikasi politik khususnya.